



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKLASIN
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 644528

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/82 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m2/135 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 95.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX/MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 14.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 859.000.000

III. HUTANG

Rp. 172.800.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

686.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Pada tanggal 12 Juni 2026 telah dilaksanakannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan sehingga Bapak Muklasin di lantik sebagai Kepala SPPMHKP Bima menggantikan Bapak Jonison Petrus, untuk pelaporan LHKPN 2025 Pak Muklasin telah melaporkan tetapi untuk bukti pengajuannya masi belum tersedia sehingga kami lampirkan bukti LHKP 2024 atas nama Bapak Muklasin selanjutnya bukti pelaporan tahun 2025 apabila telah tersedia akan kami upload kembali. Terimakasih